

TUGAS AKHIR

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2013-2014**

***FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT
SLEMAN REGENCY IN 2013-2014***

Disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Ahli Madya

Dosen Pembimbing:

Dra. Sumirah, M.Si., Ak



Oleh:

Yuliana Rahmawati

13/344995/SV/03509

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPARTEMEN EKONOMIKA DAN BISNIS
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2016**

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2013-2014**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada

Diterima dan disetujui oleh,

Penguji II



Dra. Sumirah, Msi., Ak.

Penguji I



Faiz Zamzami, SE., M.Acc., QIA.

Mengetahui,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Wikan Sakarito, S.T., M.Sc., Ph.D.

Ketua Departemen



Dra. Wahyu Hidayati, M.Si.

UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEPARTEMEN EKONOMI DAN BISNIS, SEKOLAH VOKASI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul:

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SLEMAN PERIODE 2013-2014**

yang diajukan untuk diuji tanggal 20 Juni 2016 adalah hasil karya saya pribadi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas. Baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan tugas akhir yang saya ajukan sebagai tulisan sayasendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah adalah hasil pemikiran saya sendiri, berarti saya bersedia untuk melepaskan semua hak yang telah diberikan oleh Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Pembuat Pernyataan,



Yuliana Rahmawati

NIM. 13//344995/SV/03509

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan segala kenikmatan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Departemen Ekonomika dan Bisnis. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, saya tidak mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Alloh SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
2. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan magang dan mengambil data Tugas Akhir.
3. Dra. Sumirah, M.Si., Ak selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Faiz Zamzami, SE., M., Acc., QIA selaku penguji I tugas akhir yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis.
5. Orang Tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan material dan moral.
6. Lifa, Laras, Hana, Shabrina, Novi, Anik, Mbak Amin, Mbak Mila karena motivasi dari kalian...*Love* karena Allah SWT.
7. Teman-teman majelis syuro dan UMMATI yang begitu spesial, yang mau berbagi kebahagiaan dan kesedihan bersama.
8. Teman-teman satu perjuangan angkatan 2013 yang telah mendukung Saya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM	x
INTISARI/ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Manfaat Penulisan	5
1.6 Kerangka Penulisan	6
BAB II.....	7
GAMBARAN UMUM PENULISAN	7
2.1 Kondisi Umum.....	7
2.2 Kondisi Umum Penulisan	15
2.3 Tinjauan Pustaka	16
2.4 Metodologi Penulisan	25
BAB III	28
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Sleman	28
3.2 Analisis	36
3.3 Pembahasan.....	37
BAB IV	61

KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Perbandingan Aset Tahun 2013-2014.....	38
Tabel 2 Rasio Proporsi Aset Terhadap Total Aset Tahun 2013-2014	43
Tabel 3 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2013-2014.....	48
Tabel 4 Kriteria Efektivitas Pendapatan Tahun 2013-2014.....	49
Tabel 5 Analisis Efektivitas Pendapatan Tahun 2013-2014	50
Tabel 6 Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2013-2014.....	53
Tabel 7 Rasio Perbandingan Pendapatan Tahun 2013-2014 (dalam Rupiah).....	55
Tabel 8 Rasio Perbandingan Belanja Tahun 2013-2014.....	57
Tabel 9 Analisis Laporan Arus Kas Tahun 2013-2014.....	58

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 1 Kerangka Penulisan Tugas Akhir.....	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.....	9
Gambar 3 Neraca Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014.....	30
Gambar 4 LRA Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014.....	32
Gambar 5 LAK Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Atas Laporan Keuangan Aset Lancar.....	64
Lampiran 2 Catatan Atas Laporan Keuangan Persediaan.....	65
Lampiran 3 Catatan Atas Laporan Keuangan Transfer 2013.....	69
Lampiran 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 2014	70

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LAK	Laporan Arus Kas
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
SAP	Standar Akuntan Publik
RUUTAM	Rasio Utang Terhadap Aset Modal
Dana <i>WISMP</i>	Dana <i>Water Resources and Irrigation Secktor Management</i>
RUTPAD	Rasio Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah

INTISARI/ABSTRAK

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu komponen yang penting yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan sektor publik dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan pada pemerintah daerah kabupaten Sleman periode 2013-2014.

Analisis neraca dengan analisis perbandinga, analisis modal kerja, analisis rasio keuangan, dan analisis rasio utang. Laporan realisasi anggaran dengan metode analisis efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja, dan perbandingan aset. laporan arus kas dengan metode analisis laporan arus kas.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2013-2014 dikumpulkan dan dianalisis pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kinerja keuangan tahun 2014 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Analisis Neraca, Analisis LRA dan Analisis LAK.

ABSTRACT

The financial statements of local government is one of the important components that are used to analyze the financial performance of local governments used to decision making. This study aims to determine the financial position, performance and cash flows of an entity that is useful to a large number of users of financial statements of public sector in making and evaluating decisions about allocation of resources required by an entity in its activities to achieve the objectives at the district government of Sleman period 2013-2014.

The balance sheet was analyzed with comparative analysis, financial ratio analysis and debt ratio analysis. Budget realization reports with revenue effectiveness analysis and analysis of the efficiency spending, and comparative revenue and purchase. cash flow statement reports cash flow analysis method.

The financial statements of the Government of Sleman years 2013-2014 were collected and analyzed on the Balance Sheet, budget realization report and Cash Flow Statement. Based on research that has been done it can be concluded financial performance in 2014 better than 2013.

Keywords: Financial Statements, Financial Performance, Balance Sheet Analysis, LRA and LAK Analysis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintah di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Undang-undang yang mengatur otonomi daerah yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah dianggap menjadi salah satu cara yang efektif dalam pelaksanaan pemerataan pada setiap daerah serta diharapkan mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralisasi yang kurang adil.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan sektor publik dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Tujuan laporan keuangan menurut SAP adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, sedangkan tujuan laporan keuangan menurut *International Federation of Accounting Public Sector Committee* (IFAC PSC) adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atau unit kerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Jenis laporan keuangan pokok yang harus ada adalah neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK), catatan atas laporan keuangan (CALK), lampiran: laporan keuangan BUMD.

Tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan untuk pembuatan keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan (*financial Statement Analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang memiliki potensi yang cukup besar salah satu potensi yang diandalkan oleh Kabupaten Sleman yaitu dalam bidang pariwisata. Banyak tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sleman, sehingga pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Sleman banyak berasal dari wisata yang ada di Sleman. Wisata tersebut yaitu Wisata Desa, Wisata Budaya, Wisata Pendidikan, Wisata Sejarah, Wisata Candi, Wisata Alam, Wisata Agro, Wisata Musium dan Wisata Monumen. Tempat magang saya pada Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga lebih mudah untuk mengambil data dan informasi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian analisis laporan keuangan kabupaten Sleman, dengan cara melakukan analisis terhadap neraca dengan menganalisis analisi aset, analisis modal kerja, rasio keuangan dan analisi utang. Yang kedua menganalisis laporan realisasi anggaran dengan analisis realisasi anggaran dan belanja, analisis pembiayaan. Yang ketiga laporan arus kas dengan analisis laporan arus kas. Analisis laporan keuangan dilakukan dari tahun 2013-2014 yaitu 2 periode. Penelitian yang akan dilakukan penulis akan dituangkan dalam Tugas Akhir yang berjudul: Analisis Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Periode 2013-2014

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman dilihat dari rasio keuangan tahun 2013-2014 ?

2. Apa penyebab terjadinya kenaikan/penurunan dari kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sleman ?

1.3 Batasan Masalah

Masalah yang dikaji penulis dalam Tugas Akhir ini adalah analisis laporan keuangan Kabupaten Sleman periode 2013-2014, agar dalam penulisan Tugas Akhir ini tetap fokus pada topik dan rumusan masalah yang akan dibahas maka penulis akan membuat batasan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan laporan keuangan Kabupaten Sleman yang berupa neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas periode 2013-2014.
2. Mengumpulkan informasi tentang penyebab kenaikan/penurunan kinerja keuangan tahun 2013.
3. Melakukan analisis secara deskriptif terhadap neraca dengan analisis aset, analisis modal kerja, analisis rasio keuangan, dan analisis utang. Melakukan analisis terhadap laporan realisasi anggaran dengan analisis efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja dan analisis perbandingan pendapatan dan belanja. Melakukan analisis terhadap laporan arus kas dengan analisis laporan arus kas.

1.4 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui penyebab kenaikan/penurunan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2014

1.5 Manfaat Penulisan

a) Bagi Penulis

1. Untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah.
2. Menerapkan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

b) Bagi Pemerintah Daerah

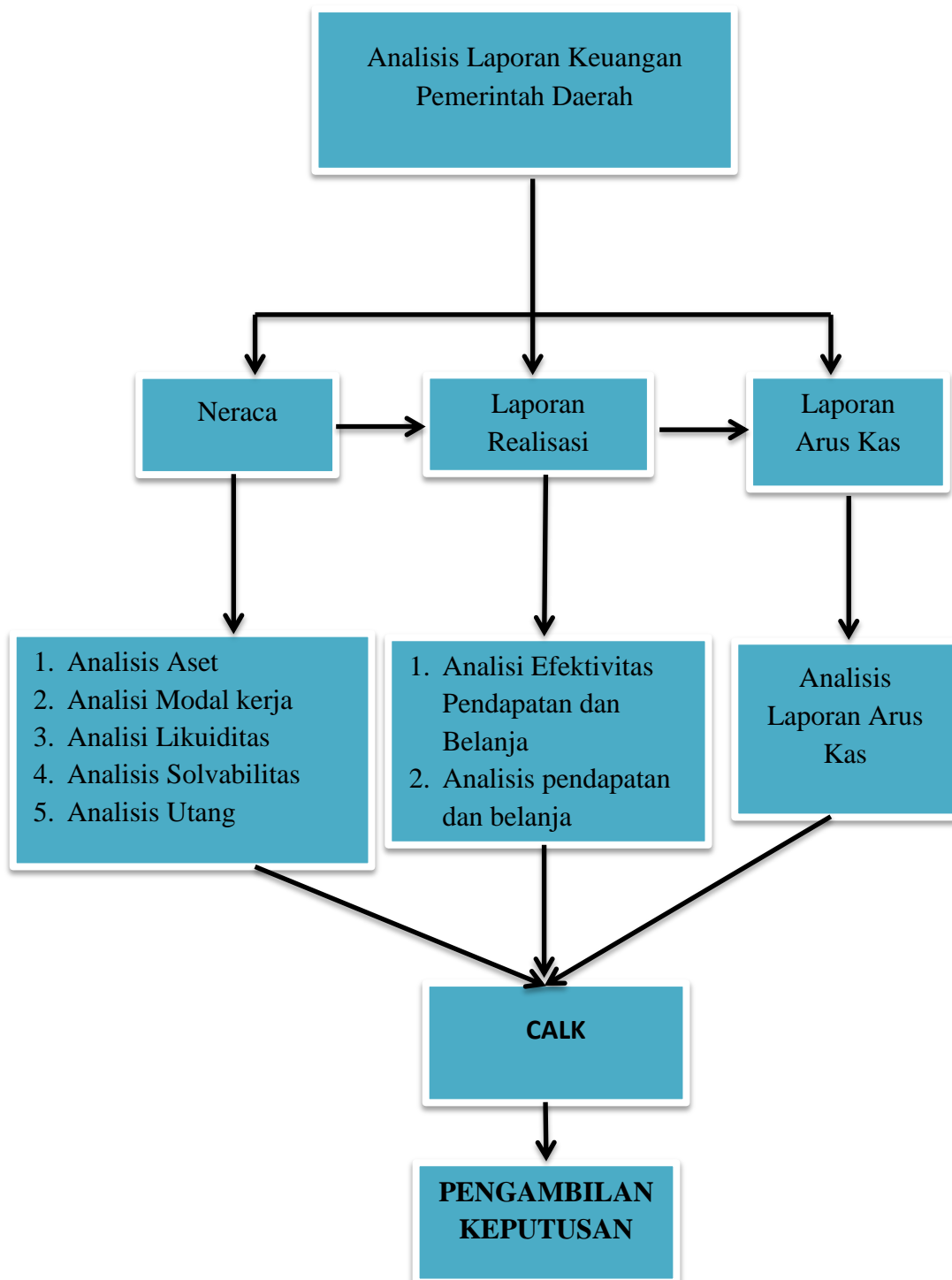
Diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c) Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

1.6 Kerangka Penulisan

Gambar 1 Kerangka Penulisan Tugas Akhir



BAB II

GAMBARAN UMUM PENULISAN

2.1 Kondisi Umum

2.1.1 Institusi

2.1.1.1 Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

2.1.1.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau $574,82 \text{ Km}^2$ atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km^2 , dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

2.1.1.4 Potensi wisata

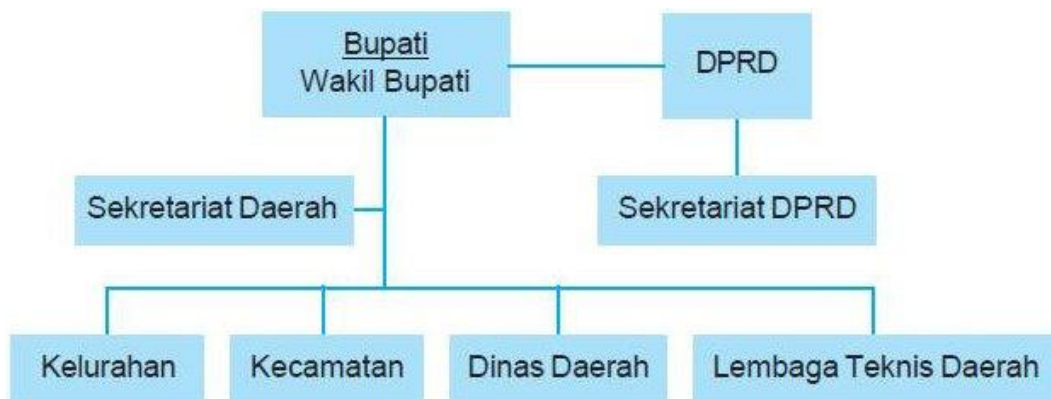
Daya tarik wisata Sleman merupakan perpaduan antara karakter alam yang kuat, kebudayaan dan kepurbakalaan. Untuk memumjang kegiatan wisata telah tersedia fasilitas hotel, rumah makan, bandara dan sarana prasarana transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Wisata yang diandalkan:

1. Wisata Desa
2. Wisata Budaya
3. Wisata Pendidikan
4. Wisata Sejarah
5. Wisata Candi
6. Wisata Alam
7. Wisata Agro
8. Wisata Museum

9. Wisata Monumen

2.1.2 Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman



1. Bupati

Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Bupati sebagai kepala daerah mempunyai tugas antara lain:

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda).
2. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

3. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
4. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sedangkan tugas wakil bupati adalah sebagai berikut.

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
2. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah provinsi.
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/ kota. Selain DPRD juga bertugas untuk membuat peraturan daerah dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD).

3. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hukum, organisasi, pengelolaan barang daerah, keuangan, kepegawaian, umum dan memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemerintah kabupaten; pengkoordinasian perangkat daerah; penyelenggaraan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata

laksana, keuangan, barang daerah dan umum; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris Daerah membawahi 2 (dua) orang Asisten, yaitu: Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I) dan Asisten Bidang Umum (Asisten II). Asisten Bidang Pemerintahan membawahi 2 bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian hukum organisasi dan tatalaksana Asisten Bidang Umum membawahi 3 bagian yaitu Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Umum.

4. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten. Tugas sekretariat DPRD antara lain:

- 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- 3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 4) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah.

5. Polisi Pamong Praja

Tugas polisi pamong praja adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta merupakan penegak peraturan daerah.

6. Kecamatan

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten.

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa/kelurahan.

7. Kelurahan

Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah. Kelurahan Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merupakan perangkat kabupaten/kota di bawah kecamatan.
2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan.
3. Memberdayakan masyarakat. Dan menegakkan peraturan daerah
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

8. Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Tugas pokok Dinas Daerah adalah menyelenggarakan kewenangan daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten 14 dinas, yaitu:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;

5. Dinas Perhubungan dan Kominfo;
6. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
9. Dinas Perindustrian;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12. Dinas Pasar;
13. Dinas Pendapatan Daerah;
14. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

9. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang, pengkoordinasi pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sesuai bidang lingkup tugasnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga teknis daerah memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.3 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdayasaing dan berkeadilan gender pada tahun 2015.

Misi

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan disegala bidang.

2.2 Kondisi Umum Penulisan

Penulisan tugas akhir dengan tema Analisis Laporan Keuangan telah dilakukan oleh beberapa penulis akan tetapi penulis tersebut hanya membahas tentang analisis laporan keuangan saja. Dalam penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisi Laporan Keuangan Kabupaten Sleman Periode 2013-2014” dibahas juga hambatan yang dialami dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman.

Dengan dilakukannya analisis laporan keuangan dan analisis hambatan disertai pemecahan masalah diharapkan pengguna laporan keuangan dapat

mengambil keputusan yang tepat dan masyarakat umum mengenai kinerja keuangan dari kabupaten Sleman.

2.3 Tinjauan Pustaka

2.3.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Tujuan utama Laporan Keuangan adalah untuk menyediakan informasi yg relevan, memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yg menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (PSAK No. 45). Tujuan tersebut untuk memberikan informasi keuangan terhadap:

1. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.
2. Manajerial yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.
3. Transparansi yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

2.3.2 Komponen laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan Mahmudi dalam bukunya Analisis laporan keuangan sektor publik komponen laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca).

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kegiatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam LRA meliputi: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan SiLPA.

3. Laporan Aliran kas (LAK).

Laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

2.3.3 Analisis Laporan keuangan

Analisi laporan keuangan (*financial Statement Analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-

data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis.

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Beberapa teknik analisis laporan keuangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Neraca

- 1.1 Analisis Aset

Berdasarkan laporan keuangan neraca kita dapat melakukan analisis aset pemerintah daerah. Analisis aset tersebut dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan tiap-tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode pelaporan).
 2. Menghitung proporsi atau presentase masing-masing kelompok aset dengan total aset.
 3. Menghitung modal kerja (working kapital) yang dimiliki pemerintah daerah.
 4. Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset.
 5. Mengevaluasi hasil penghitungan, interpretasi dan prediksi.

- 1.2 Analisis Modal Kerja

Analisis ini bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin

harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

1.3 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah analisis yang membutuhkan informasi aset dalam neraca.

Beberapa rasio keuangan memang ada yang kurang relevan untuk sektor publik, seperti analisis perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aset, ROA dan ROI, karena tujuan menggunakan rasio tersebut adalah dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sedangkan pada sektor publik merupakan perusahaan nirlaba. Analisis yang dapat digunakan dalam sektor publik adalah sebagai berikut:

1.3.1 Rasio Likuiditas

Rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio yang digunakan meliputi:

1.3.2 Rasio Lancar (current ratio)

Membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya.

Rasio lancar dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio Lancar = \frac{Aktiva Lancara}{Utang Lancar}$$

1.3.3 Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah.

Rasio kas dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio Kas = \frac{Kas + efek}{Utang Lancar}$$

1.3.4 Rasio cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menunjukkan beberapa alat likuiditas yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi utang lancar.

Rasio cepat dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio Lancar = \frac{Aktiva lancar - Persediaan}{Utang Lancar}$$

1.3.5 Rasio Solvabilitas

Digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Rasio solvabilitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

1.4 Rasio Utang (Leverage Ratio)

Rasio ini sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutangnya.

1.4.1 Rasio utang terhadap ekuitas

Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijamin untuk keseluruhan utang.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

1.4.2 Rasio utang terhadap aset modal

Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan menjamin utang.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RUUTAM = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

1.4.3 Rasio Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan Pendapatan Asli daerah.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RUTPAD = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

2. Analisis Realisasi Anggaran

3.2.1 Analisis Efektivitas Pendapatan

Efektivitas pendapatan dapat diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Dengan Rumus Perhitungan:

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

3.2.2 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan pada rasio efisiensi belanja ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah

dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Efisiensi belanja dirumus dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

3.2.3 Analisis Pendapatan dan Belanja

Analisis pendapatan salah satunya dapat dilakukan dengan:

2.1.1 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Analisis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Pendapatan } Th_t \\ &= \frac{\text{pendapatan } Th_t - \text{pendapatan } Th_{t-1}}{\text{Pendapatan } Th_{t-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

2.1.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja } Th_t \\ &= \frac{\text{Realisasi Belanja } Th_t - \text{Realisasi Belanja } Th_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja } Th_{t-1}} \end{aligned}$$

3. Analisis Laporan Arus Kas

Digunakan untuk mencerminkan kondisi obyektif kas, perubahan selama satu periode, arus masuk dan keluar kas yang sangat jelas yang dapat diuji kebenarannya dengan melihat neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

2.3.4 Kajian sebelumnya

Panti (2015) melakukan penelitian tentang analisis laporan keuangan kabupaten Kulon Progo periode 2012-2013. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa kinerja keuangan kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 mengalami peningkatan, baik dari segi realisasi maupun dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari adanya efektivitas pendapatan pada tahun 2013 yaitu 102,19% sedangkan tahun 2012 yaitu 101,92%. Berdasarkan analisis likuiditas, solvabilitas, dan rasio utang berada pada keadaan yang *over-liquid*. Namun, keadaan yang *over-likuid* ini tidak berdampak buruk karena pada dasarnya keuangan pemerintah yang didanai dari utang memang sangat rendah. Dari rasio utang terlihat bahwa kemampuan pemerintah untuk melunasi hutang sangat bagus. Laporan arus kas menunjukkan kinerja yang baik. Perbedaan dengan penelitian yang penulis

laksanakan terletak pada objek yang diteliti penulis adalah laporan keuangan kabupaten Sleman.

2.4 Metodologi Penulisan

2.4.1 Metodologi Penulisan

2.4.1.1 Metode Kuantitatif

Metode Kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut “sample” dalam penelitian kuantitatif. Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut “data”. Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Penelitian kuantitatif mengadakan eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul. Metode ini digunakan untuk menghitung analisis rasio keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman.

2.4.2 Metode pengumpulan data:

2.4.2.1 Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengamati lingkungan penelitian, pencatatan dan pengolahan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Kabupaten Sleman.

2.4.2.2 Wawancara

Dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berkepentingan, wawancara ini saya lakukan kepada kepala divisi anggaran dan juga karyawan/karyawati divisi anggaran. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mencari informasi untuk menganalisis penyebab kenaikan/penurunan kinerja keuangan Kabupaten Sleman.

2.4.2.3 Kajian Dokumen

Dengan cara melihat jurnal, makalah dan tugas akhir dari penulisan-penulisan sebelumnya tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Disini saya mengambil referensi dari Tugas Akhir yang diteliti oleh Panti (2015) yaitu Analisis Laporan Keuangan Kabupaten Kulon Progo Periode 2012-2013.

2.4.3 Jenis dan Sumber Data

2.4.3.1 Data primer

Data primer adalah data yang dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama. Disini saya mengambil data dari observasi dan wawancara

untuk menganalisis penyebab kenaikan/penurunan kinerja keuangan Kabupaten Sleman.

2.4.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Disini saya mengambil laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas Kabupaten Sleman dari tahun 2013-2014 yang digunakan sebagai data yang akan diolah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Kabupaten Sleman.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Sleman

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan sektor publik dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi:

1. Neraca

Komponen dalam neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Komponen dalam LRA yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Komponen dalam LAK yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus kas dari aktivitas nonkeuangan.


4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tujuan CaLK yaitu menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antar pihak.

Gambar 3 Neraca Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014

 NERACA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013					(dalam rupiah)	
URAIAN	CATATAN	2014	2013			
ASET						
ASET LANCAR	5.2.1					
Kas	5.2.1.1	500.218.955.134,23	432.588.133.628,86			
Piutang Pajak	5.2.1.2	119.017.559.954,39	23.191.565.100,90			
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih		(37.906.306.979,91)	(1.273.701.575,42)			
<i>Piutang Pajak Netto</i>		<i>81.111.252.974,48</i>	<i>21.917.863.525,48</i>			
Piutang Retribusi	5.2.1.3	5.497.137.456,00	5.818.910.937,40			
Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih		(2.045.075.638,20)	(2.065.930.813,45)			
<i>Piutang Retribusi Netto</i>		<i>3.452.061.817,80</i>	<i>3.752.980.123,95</i>			
Piutang lainnya	5.2.1.4	10.278.609.167,96	15.423.988.205,37			
Penyisihan Piutang Lainnya Tidak Tertagih		(541.453.964,95)	(514.205.363,65)			
<i>Piutang Lainnya Netto</i>		<i>9.737.155.203,01</i>	<i>14.909.782.841,72</i>			
Persediaan	5.2.1.5	50.619.578.124,27	127.298.916.403,77			
Jumlah Aset Lancar		645.139.003.253,79	600.467.676.523,78			
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.2.2					
Investasi Non Permanen	5.2.2.1	49.572.784.712,50	49.927.472.883,00			
Investasi Permanen	5.2.2.2	297.802.915.008,49	182.416.544.743,29			
Jumlah Investasi Jangka Panjang		347.375.699.720,99	232.344.017.626,29			
ASET TETAP	5.2.3					
Tanah	5.2.3.1	702.398.844.833,00	679.772.589.094,00			
Peralatan dan Mesin	5.2.3.2	448.458.951.295,98	383.720.364.040,00			
Gedung dan Bangunan	5.2.3.3	861.235.590.911,41	803.473.918.381,56			
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.3.4	1.044.302.247.755,02	950.239.706.661,04			
Aset Tetap Lainnya	5.2.3.5	58.190.859.198,00	47.746.589.775,52			
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.2.3.6	130.779.256.670,20	32.362.530.496,00			
Jumlah Aset Tetap		3.245.366.750.663,61	2.897.315.698.448,12			
ASET LAINNYA	5.2.4					
Sistem Informasi	5.2.4.1	5.286.908.237,00	4.304.352.937,00			
Aset Lain-lain	5.2.4.2	19.558.398.017,88	32.011.485.934,83			
Built Operating Transfer (BOT)	5.2.4.3	272.874.000,00	272.874.000,00			
Jumlah Aset Lainnya		25.118.180.254,88	36.588.712.871,83			
JUMLAH ASET		4.262.999.633.893,27	3.766.716.105.470,02			
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.5					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.5.1	298.507.810,00	1.173.443.316,00			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.2.5.2	0,00	150.086.013,08			
Pendapatan diterima di muka	5.2.5.3	42.982.705,68	0,00			
Utang jangka Pendek Lainnya	5.2.5.4	3.091.618.088,48	4.085.118.924,91			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.433.108.604,16	5.408.648.253,99			
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.2.6					
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.2.6.1	0,00	0,00			
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.2.6.2	323.900.000,00	323.900.000,00			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		323.900.000,00	323.900.000,00			
Jumlah Kewajiban		3.757.008.604,16	5.732.548.253,99			
EKUITAS DANA						
Ekuitas Dana Lancar	5.2.7					
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA)	5.2.7.1	499.724.664.810,23	431.359.469.619,88			
Pendapatan yang Ditangguhkan	5.2.7.2	195.782.514,00	55.220.693,00			
Cadangan Piutang	5.2.7.3	94.300.469.995,29	40.580.626.491,15			
Cadangan Persediaan	5.2.7.4	50.619.578.124,27	127.298.916.403,77			
Dana yang disediakan untuk Utang Jangka Pendek	5.2.7.5	(3.134.600.794,16)	(4.235.204.937,99)			
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		641.705.894.649,63	595.059.028.269,79			

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2013-2014

YULIANA RAHMAWATI, Dra.Sumirah, Msi., Ak.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

URAIAN	CATATAN	2014	2013
Ekuitas Dana Investasi	5.2.8		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	5.2.8.1	347.375.699.720,99	232.344.017.626,29
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5.2.8.2	3.245.366.750.663,61	2.897.315.698.448,12
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	5.2.8.3	25.118.180.254,88	36.588.712.871,83
Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang	5.2.8.4	(323.900.000,00)	(323.900.000,00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		3.617.536.730.639,48	3.165.924.528.946,24
Jumlah Ekuitas Dana		4.259.242.625.289,11	3.760.983.557.216,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.252.998.633.893,27	3.766.716.105.470,02

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sleman, 9 Mei 2015

 BUPATI SLEMAN,

 SRI PURNOMO

Gambar 4 LRA Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013						(dalam rupiah)
URAIAN	CATATAN	2014	2013	%	REALISASI 2013	
		ANGGARAN	REALISASI			
PENDAPATAN	5.1.1	1.969.264.200.317,70	2.076.820.131.084,13	105,46	1.899.525.636.838,83	
Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	474.917.917.941,46	573.337.599.560,11	120,72	449.270.304.864,83	
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	282.100.000.000,00	326.033.995.236,66	115,57	274.628.955.500,77	
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1	35.114.444.240,00	42.632.198.781,03	121,41	48.001.679.730,61	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1	23.747.000.000,00	23.654.901.728,19	99,61	15.551.529.372,17	
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1	133.956.473.701,46	181.016.503.814,23	135,13	111.088.140.261,28	
Pendapatan Transfer	5.1.1.2	1.494.346.282.376,24	1.499.148.394.633,56	100,32	1.442.483.146.251,00	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2	1.048.511.113.184,00	1.034.404.522.916,00	98,65	992.782.430.677,00	
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2	43.734.248.160,00	41.222.388.370,00	94,26	46.908.099.802,00	
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.1.1.2	0,00	384.280.433,00	0,00	348.339.971,00	
Dana Bagi Hasil Cukai	5.1.1.2	4.001.153.024,00	4.190.444.113,00	104,73	3.112.748.904,00	
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2	952.102.502.000,00	952.102.502.000,00	100,00	891.589.912.000,00	
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2	48.673.210.000,00	36.504.908.000,00	75,00	50.823.330.000,00	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2	280.695.737.070,00	274.661.712.000,00	97,85	286.912.555.070,00	
Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	5.1.1.2	254.817.230.070,00	248.783.205.000,00	97,63	254.817.230.070,00	
Dana Insentif Khusus	5.1.1.2	25.878.507.000,00	25.878.507.000,00	100,00	32.095.325.000,00	
Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2	165.139.432.122,24	190.082.159.717,56	115,10	162.788.160.504,00	
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	5.1.1.2	136.308.645.122,24	165.068.472.717,56	121,10	134.451.960.504,00	
Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	5.1.1.2	28.830.787.000,00	25.013.687.000,00	86,76	28.336.200.000,00	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.1.1.3	0,00	4.334.136.890,46	0,00	7.772.185.723,00	
Pendapatan Hibah	5.1.1.3	0,00	4.334.136.890,46	0,00	1.016.000.000,00	
Pendapatan dari Piutang PBB-P2 yang belum Diserahterimakan	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	6.756.185.723,00	
BELANJA	5.1.2	2.288.645.856.460,56	1.896.477.377.488,36	82,86	1.693.528.297.005,79	
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.792.142.435.143,27	1.542.756.893.656,11	86,08	1.420.339.683.204,62	
Belanja Pegawai/Personalia	5.1.2.1	1.288.392.920.497,27	1.110.060.035.820,14	86,16	1.034.255.811.435,98	
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1	402.709.029.480,00	351.490.651.032,79	87,28	227.028.261.886,61	
Belanja Bunga	5.1.2.1	144.000.000,00	12.341.084,68	8,57	28.750.905,83	
Belanja Subsidi	5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	19.518.562.420,00	
Belanja Hibah	5.1.2.1	59.195.408.166,00	40.979.605.718,50	69,23	117.707.233.556,20	
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1	41.701.077.000,00	40.214.260.000,00	96,43	21.801.063.000,00	
BELANJA MODAL	5.1.2.2	387.231.175.442,00	282.862.049.259,00	73,05	206.859.865.136,17	
Belanja Tanah	5.1.2.2	58.805.400.000,00	17.763.305.909,00	30,21	37.115.234.370,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	80.272.887.776,00	58.797.899.977,00	73,25	45.628.593.658,40	
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2	147.369.407.554,00	125.749.831.238,00	85,33	73.350.676.738,77	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2	91.100.401.870,00	77.800.572.649,00	85,40	49.490.108.162,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2	9.683.078.242,00	2.750.439.486,00	28,40	1.275.252.207,00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	26.291.764.590,29	841.163.588,00	3,20	0,00	
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	26.291.764.590,29	841.163.588,00	3,20	0,00	
TRANSFER	5.1.2.4	82.980.481.285,00	70.017.270.985,25	84,38	66.328.748.665,00	
Transfer bagi Hasil ke Desa	5.1.2.4	82.980.481.285,00	70.017.270.985,25	84,38	66.328.748.665,00	
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota & Pemerintah Desa	5.1.2.4	41.563.030.285,00	34.793.261.504,00	83,67	33.366.158.150,00	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota & Pemerintah Desa	5.1.2.4	41.397.451.000,00	35.224.009.481,25	85,09	32.962.590.515,00	
Surplus/(Defisit)		(319.381.656.142,86)	180.342.753.595,77	(56,47)	205.997.339.833,04	

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2013-2014

YULIANA RAHMAWATI, Dra.Sumirah, Msi., Ak.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

URAIAN	CATATAN	2014			REALISASI 2013
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PEMBIAYAAN	5.1.3				
Penerimaan Pembiayaan	5.1.3.1				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	5.1.3.1	431.359.469.619,86	431.359.469.619,86	100,00	289.079.874.715,22
Jumlah		431.359.469.619,86	431.359.469.619,86	100,00	289.079.874.715,22
Pengeluaran Pembiayaan	5.1.3.2				
Penyertaan Modal	5.1.3.2	111.839.813.477,00	111.839.813.477,00	100,00	63.580.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	5.1.3.2	138.000.000,00	137.744.928,40	99,82	137.744.928,40
Jumlah		111.977.813.477,00	111.977.558.405,40	99,99	63.717.744.928,40
Pembiayaan Netto		319.381.656.142,86	319.381.911.214,46	100,00	225.362.129.786,82
SILPA	5.1.4	0,00	499.724.664.810,23		431.359.469.619,86


Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Sleman, 9 Mei 2015
BUPATI SLEMAN,

[Signature]
SRI PURNOMO

Gambar 5 LAK Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014

<div style="text-align: center;">  <p>LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013</p> </div>			
(dalam rupiah)			
URAIAN	CATATAN	2014	2013
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.3		
Arus Masuk Kas	5.3.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.3.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1	326.033.995.236,66	274.628.955.500,77
Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.1	42.632.198.781,03	48.001.679.730,61
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1	23.654.901.728,19	15.551.529.372,17
Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1	180.325.693.814,23	110.246.940.261,28
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		572.646.789.560,11	448.429.104.664,83
PENDAPATAN TRANSFER			
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.3.1		
Dana Bagi Hasil Pajak	5.3.1	41.222.388.370,00	46.908.099.802,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.3.1	384.280.433,00	348.339.971,00
Dana Bagi Hasil Cukai	5.3.1	4.190.444.113,00	3.112.748.904,00
Dana Alokasi Umum	5.3.1	952.102.502.000,00	891.589.912.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.3.1	36.504.908.000,00	50.823.330.000,00
Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	5.3.1	0,00	254.817.230.070,00
Dana Penyesuaian dan Otsus	5.3.1	25.878.507.000,00	32.095.325.000,00
Dana Tunjangan Pendidikan	5.3.1	248.783.205.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat		1.309.066.234.916,00	1.279.694.985.747,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI	5.3.1		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.3.1	165.068.472.717,56	134.451.960.504,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.3.1	25.013.687.000,00	28.336.200.000,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi		190.082.159.717,56	162.788.160.504,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.499.148.394.633,56	1.442.483.146.251,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	5.3.1		
Pendapatan Hibah	5.3.1	4.334.136.890,46	1.016.000.000,00
Pendapatan dari Piutang PBB-P2 yang belum Diserahterimakan	5.3.1	0,00	6.756.185.723,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		4.334.136.890,46	7.772.185.723,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.076.129.321.064,13	1.898.684.436.638,83
Arus Keluar Kas	5.3.1		
BELANJA OPERASI	5.3.1		
Belanja Pegawai/Personalia	5.3.1	1.110.060.035.820,14	1.034.255.811.435,98
Belanja Barang	5.3.1	351.490.651.032,79	227.028.261.886,61
Belanja Bunga	5.3.1	12.341.084,88	28.750.905,83
Belanja Subsidi	5.3.1	0,00	19.518.562.420,00
Belanja Hibah	5.3.1	40.979.605.718,50	117.707.233.556,20
Belanja Bantuan Sosial	5.3.1	40.214.260.000,00	21.801.063.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.542.768.893.656,11	1.420.339.683.204,62
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.3.1		
Belanja Tidak Terduga	5.3.1	841.163.588,00	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		841.163.588,00	0,00
BELANJA TRANSFER	5.3.1		
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Prov/Kab/Desa	5.3.1	34.793.261.504,00	33.366.158.150,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prov/Kab/Desa	5.3.1	35.224.009.481,25	32.962.590.515,00
Jumlah Belanja Transfer		70.017.270.985,25	66.328.748.665,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.613.615.328.229,36	1.486.668.431.869,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		462.513.992.834,77	412.016.004.969,21

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2013-2014

YULIANA RAHMAWATI, Dra.Sumirah, Msi., Ak.

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

URAIAN	CATATAN	2014	2013
Ekuitas Dana Investasi	5.2.8		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	5.2.8.1	347.375.699.720,99	232.344.017.626,29
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5.2.8.2	3.245.366.750.663,61	2.897.315.698.446,12
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	5.2.8.3	25.118.180.254,88	36.588.712.871,83
Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang	5.2.8.4	(323.900.000,00)	(323.900.000,00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		3.617.536.730.639,48	3.165.924.528.946,24
Jumlah Ekuitas Dana		4.259.242.625.289,11	3.760.983.557.216,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.262.999.633.893,27	3.766.716.105.470,02

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Sleman, 9 Mei 2015
BUPATI SLEMAN,

[Signature]
SRI PURNOMO

3.2 Analisis

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya SKPD. Laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis tersebut dilakukan analisis neraca, analisis laporan realisasi anggaran dan analisis laporan arus kas.

Adapun dasar hukum yang dimiliki oleh kabupaten Sleman dalam pengelolaan keuangan, Dasar Hukumnya adalah sebagai berikut:

1. *UU No. 17 tahun 2003* tentang keuangan negara
2. *UU No. 1 tahun 2004* tentang perbendaharaan
3. *UU No. 23 tahun 2014* tentang pemerintahan daerah
4. *PP No.58 tahun 2005* tentang Pengelolaan keuangan Daerah
5. *Permendagri No. 13 tahun 2006* tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan perubahannya Permendagri No. 59 thn 2007 dan perubahan ke dua Permendagri No. 21 thn 2011.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Kinerja Keuangan

3.3.1.1 Analisis Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

3.3.1.1.1 Perbandingan Aset

Tujuan dari analisis perbandingan aset adalah untuk mengetahui perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua periode berurutan, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Analisis nya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Perbandingan Aset Tahun 2013-2014

URAIAN			% NAIK/TURUN
	31-Des-14	31-Des-13	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	500.218.955.134,23	432.588.133.628,86	15,63
Piutang Pajak	81.111.252.974,48	21.917.863.525,48	270,07
Piutang retribusi	3.452.061.817,80	5.818.910.937,90	(40,68)
Piutang lainnya	9.737.155.203,01	14.909.782.841,72	(34,69)
Persediaan	50.619.578.124,27	127.298.916.403,77	(60,24)
Jumlah Aset Lancar	645.139.003.253,79	600.467.676.523,78	7,44
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen	49.572.784.712,50	49.927.472.883,00	(0,71)
Investasi Permanen	297.802.915.008,49	182.416.544.743,29	63,25
Jumlah Investasi Jangka Panjang	347.375.699.720,99	232.344.017.626,29	49,51
ASET TETAP			
Tanah	702.398.844.833,00	679.772.589.094,00	3,33
Peralatan dan Mesin	448.459.951.295,98	383.720.364.040,00	16,87
Gedung dan Bangunan	861.235.590.911,41	803.473.918.381,56	7,19
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.044.302.247.755,00	950.239.706.661,04	9,90
Aset Tetap Lainnya	58.190.859.198,00	47.746.589.775,52	21,87
Konstruksi dalam Pengerjaan	130.779.256.670,20	32.362.530.496,00	304,11
Jumlah Aset Tetap	3.245.366.750.663,61	2.897.315.698.448,12	12,01
ASET LAINNYA			
Sistem Informasi	5.266.908.237,00	4.304.352.937,00	22,36
Aset Lain-lain	19.558.398.017,88	32.011.485.934,83	(38,90)
Built Operating Transfer (BOT)	272.874.000,00	272.874.000,00	-
Jumlah Aset Lainnya	25.118.180.254,88	36.588.712.871,83	(31,35)
Jumlah Aset	4.262.999.633.893,27	3.766.716.105.470,02	13,18

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Berdasarkan tabel perbandingan aset diatas diperoleh informasi bahwa pertumbuhan aset pemerintah daerah kabupaten Sleman di tahun 2014 naik 13,18% dari tahun 2013 dengan nominal Rp 496.283.528.423,25. Angka pertumbuhan aset tersebut meskipun tidak terlalu tinggi dapat dikategorikan cukup baik. Peningkatan aset dipengaruhi oleh investasi jangka panjang yaitu 49,51% atau Rp115.031.682.094,70 dan aset lainnya yaitu 13,18% atau

Rp496.283.528.423,25. Sedangkan proporsi aset lancar dan aset tetap mempunyai porsi yang lebih kecil yaitu masing-masing 7,44% dan 12,01%. Dari 2 tahun tersebut tidak tampak adanya saldo untuk dana kas cadangan, hal ini membuktikan kalau pemerintah daerah kabupaten Sleman tidak menyisihkan dana cadangan karena tidak terdapat anggaran untuk alokasi dana cadangan, sehingga saldo dana cadangan nol.

1. Perbandingan Aset Lancar

1.1 kas

Kas bersumber dari kas di bendahara pengeluaran, kas lancar lainnya di bendahara pengeluaran (hutang pajak, bantuan bencana erupsi, bantuan sosial yang belum diserahkan kepada masyarakat, kelebihan setor kontribusi penguatan modal pada KP3M), kas di bendahara penerimaan (pendapatan jasa RSUD Prambanan, RSUD Sleman, Dinas perhubungan komunikasi dan informatika), kas di BLUD, giro, deposito. Kas pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp67.630.821.505,37 (15,63%), ini menandakan adanya peningkatan kinerja keuangan Kabupaten Sleman walaupun kecil.

1.2 Piutang pajak

Piutang pajak terdiri dari pajak hotel, restoran, reklame, air tanah. Piutang pajak pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikannya sebesar Rp59.193.389.449,00 (270,07%). Hal ini dapat diartikan bahwa adanya peningkatan dalam penunggakan pajak oleh para wajib pajak. Namun bisa jadi juga selama tahun 2014 pemerintah daerah

kabupaten Sleman gencar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sehingga hasilnya selain meningkatkan pendapatan pajak dan wajib pajak juga meningkatkan penunggakan pajak.

1.3 Piutang retribusi

Piutang retribusi berasal dari piutang retribusi pada dinas pekerjaan umum dan perumahan, dinas kesehatan, DPPD, dinas perhubungan komunikasi dan informastika, kantor pelayanan perijinan, satuan polisi pamong praja.

Piutang retribusi mengalami penurunan dari tahun 2014 dibandingkan dengan 2013. Penurunannya sebesar Rp2.366.849.120,10 (40,68%), dapat disimpulkan bahwa sebagian wajib pajak telah membayar hutangnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman, dengan demikian saldo piutang retribusi tahun 2014 berkurang dan saldo kas bertambah.

1.4 Piutang lainnya

Piutang lainnya terdiri dari piutang TP/TGR, pelayanan kesehatan, kontribusi penguatan modal, dana perimbangan. Pada tahun 2014 juga mengalami penurunan dari tahun 2013. Penurunannya sebesar Rp5.172.627.638,71 (34,69%), dapat disimpulkan bahwa sebagian wajib pajak telah membayar hutangnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman, dengan demikian saldo pada piutang lainnya berkurang dan saldo kas bertambah.

1.5 Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Jenis dari persediaan yaitu: sediaan bahan pakai habis, sediaan barang cetakan, sediaan ATK, sediaan plakat, sediaan benda-benda pos, sediaan alat listrik, sediaan pupuk, sediaan hewan ternak, sediaan alat kebersihan, sediaan obat, sediaan tumbuhan, sediaan ban, sediaan bahan radiologi.

Persediaan mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp76.679.338.279,50 (60,24%). Penurunan ini terjadi karena adanya pengurangan belanja yang dilakukan karena adanya sisa di tahun 2013.

Secara total, aset lancar pemerintah daerah kabupaten Sleman meningkat walaupun peningkatannya kecil dari Rp600.467.676.523,78 menjadi Rp645.139.003.253,79 atau 7,44%. Peningkatan aset lancar ini menandakan bahwa likuiditas pemerintah daerah kabupaten Sleman meningkat, ketersediaan kas dan setara kas jangka pendek cukup aman.

2. Perbandingan Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen (penguatan modal yang diberikan sebagai pinjaman bergulir dan non bergulir kepada masyarakat dalam bentuk giro, piutang kepada masyarakat, penyisihan piutang

tak tertagih, piutang khusus, piutang kepada masyarakat (APBN), penyisihan piutang tak tertagih, rekening SKPD) dan investasi permanen (penyertaan modal kepada bank pasar sleman, PDAM Kabupaten Sleman, BPD DIY, BUKP). Total nilai investasi jangka panjang pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 49,51%. Investasi jangka panjang tumbuh cukup tinggi. Peningkatan pertumbuhan investasi jangka panjang tersebut didorong oleh meningkatnya investasi permanen. Pemerintah daerah kabupaten Sleman mulai gencar melakukan berbagai investasi, yang termasuk investasi permanen yaitu investasi penyertaan modal kepada Bank pasar Sleman, PDAM Kabupaten Sleman, BPD DIY, BUKP.

3. Perbandingan Aset Tetap

Pada tahun 2014 aset tetap mengalami kenaikan sebesar 12,01% dibandingkan tahun 2013. Proporsinya tanah 3,33%, peralatan dan mesin 16,87%, gedung dan bangunan 7,19%, jalan, irigaasi dan jaringan 9,90%, aset tetap lainnya 21,87%, konstruksi dalam pengerjaan 304,11%, dapat dilihat bahwa yang paling besar adalah konstruksi dalam pengerjaan ini berarti pembangunan di Kabupaten Sleman berkembang pesat. Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kenaikan kinerja keuangan.

4. Perbandingan Aset Lainnya

Aset lainnya meliputi buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak dan tumbuhan. Kenaikan Aset lainnya pada pemerintah daerah Kabupaten Sleman tidak terlalu tinggi tetapi lumayan

baik yaitu 13,18%. Ini menandakan pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sleman menambah aset lainnya.

Proporsi Aset Terhadap Total Aset

Analisis proporsi aset terhadap total aset bermanfaat untuk melihat aset pemerintah daerah secara lebih global apakah kelompok aset tertentu terlalu besar sehingga kurang bagi keuangan daerah. Analisisnya sebagai berikut:

Tabel 2 Rasio Proporsi Aset Terhadap Total Aset Tahun 2013-2014

KATEGORI ASET	31-Des-14	% DARI TOTAL ASET	31-Des-13	% DARI TOTAL ASET
Aset Lancar	645.139.003.253,79	15,13%	600.467.676.523,78	15,94%
Investasi Jangka Panjang	347.375.699.720,99	8,15%	232.344.017.626,29	6,17%
Aset Tetap	3.245.366.750.663,61	76,13%	2.897.315.698.448,12	76,92%
Aset Lainnya	25.118.180.254,88	0,59%	36.588.712.871,83	0,97%
Total Aset	4.262.999.633.893,27		3.766.716.105.470,02	

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Berdasarkan informasi dalam neraca, laporan dapat dianalisis proporsi kelompok aset adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Desember 2014

1. Aset Lancar

Dalam tabel aset lancar sebesar 15,13%. Aset lancar meliputi kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya dan persediaan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang sebesar 8,15%. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen (penguatan modal yang diberikan sebagai pinjaman bergulir dan non bergulir kepada masyarakat dalam bentuk giro, piutang kepada masyarakat, penyisihan piutang tak tertagih, piutang khusus, piutang kepada masyarakat (APBN), penyisihan piutang tak tertagih, rekening SKPD) dan investasi permanen (penyertaan modal kepada bank pasar sleman, PDAM Kabupaten Sleman, BPD DIY, BUKP)

3. Aset Tetap

Aset tetap sebesar 76,13% . Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Proporsi aset tetap paling besar karena pemerintah menambah aset tetap untuk menunjang potensi yang diandalkan oleh Kabupaten Sleman yaitu di bidang Pariwisata.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya sebesar 0,59%. Aset lainnya meliputi sistem informasi, aset lain-lain, *built operating transfer*.

Pada 31 Desember 2013, proporsi komposisi aset adalah sebagai berikut:

1. Aset Lancar

Dalam tabel aset lancar sebesar 15,94%. Aset lancar meliputi kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya dan persediaan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang sebesar 6,1%. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen (penguatan modal yang diberikan sebagai pinjaman bergulir dan non bergulir kepada masyarakat dalam bentuk giro, piutang kepada masyarakat, penyisihan piutang tak tertagih, piutang khusus, piutang kepada masyarakat (APBN), penyisihan piutang tak tertagih, rekening SKPD) dan investasi permanen (penyertaan modal kepada bank pasar sleman, PDAM Kabupaten Sleman, BPD DIY, BUKP)

3. Aset Tetap

Aset tetap sebesar 76,92%. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Proporsi aset tetap paling besar karena pemerintah menambah aset tetap untuk menunjang potensi yang diandalkan oleh Kabupaten Sleman yaitu di bidang Pariwisata. Proporsi aset tetap paling besar karena pemerintah menambah aset tetap untuk menunjang potensi yang diandalkan oleh Kabupaten Sleman yaitu di bidang Pariwisata.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya sebesar 0,97%. Aset lainnya meliputi sistem informasi, aset lain-lain, *built operating transfer*.

Proporsi aset tahun 2014 cukup baik, hal ini bisa dilihat dari peningkatan investasi jangka panjang tetapi terjadi penurunan aset tetap, aset lancar dan aset

lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman lebih berfokus dalam peningkatan investasi jangka panjang.

3.3.1.1.2 Analisis Modal Kerja

Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya.

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

Aset lancar bersumber dari:

1. kas di bendahara pengeluaran, kas lancar lainnya di bendahara pengeluaran (hutang pajak, bantuan bencana erupsi, bantuan sosial yang belum diserahkan kepada masyarakat, kelebihan setor kontribusi penguatan modal pada KP3M), kas di bendahara penerimaan (pendapatan jasa RSUD Prambanan, RSUD Sleman, Dinas perhubungan komunikasi dan informatika), kas di BLUD, giro, deposito.
2. Piutang pajak terdiri dari pajak hotel, restoran, reklame, air tanah.
3. Piutang retribusi berasal dari piutang retribusi pada dinas pekerjaan umum dan perumahan, dinas kesehatan, DPPD, dinas perhubungan komunikasi dan informastika, kantor pelayanan perijinan, satuan polisi pamong praja.

4. Piutang lainnya terdiri dari piutang TP/TGR, pelayanan kesehatan, kontribusi penguatan modal, dana perimbangan.
5. Persediaan terdiri dari sediaan bahan pakai habis, sediaan barang cetakan, sediaan ATK, sediaan plakat, sediaan benda-benda pos, sediaan alat listrik, sediaan pupuk, sediaan hewan ternak, sediaan alat kebersihan, sediaan obat, sediaan tumbuhan, sediaan ban, sediaan bahan radiologi.

Kewajiban lancar bersumber dari:

1. Utang perhitungan fihak ketiga (PFK) yang meliputi potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 4,21,22 dan 23, PPN, kelebihan setor dana bergulir yang akan dikembalikan ke peminjam, utang belanja gaji, utang belanja obat.
2. Bagian lancar utang jangka panjang.
3. Utang jangka pendek lainnya.
4. Pendapatan diterima dimuka.

Analisisnya sebagai berikut:

Modal Kerja Th 2014 = Rp645139003253,79 - Rp3433108604,16

= Rp641.705.894.649,63

Modal Kerja Th 2013 = Rp600467676523,78 - Rp5408648253,99

= Rp595.059.028.269,79

Dapat dilihat pada tahun 2014 modal kerja pemerintah kabupaten Sleman mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013, ini disebabkan karena aset

lancar pemerintah kabupaten Sleman mengalami kenaikan dan kewajiban lancar mengalami penurunan.

3.3.1.1.3 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan yang relevan untuk sektor publik seperti rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio utang. Sedangkan rasio yang lain tidak relevan karena tujuan dari sektor publik bukan untuk mencari laba (perusahaan nirlaba).

Tabel 3 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2013-2014

RASIO KEUANGAN	TAHUN 2014	TAHUN 2013
RASIO LIKUIDITAS		
Rasio Lancar	187,92 : 1	111,02 : 1
Rasio Kas	160,14 : 1	89,21 : 1
Rasio Cepat	173,17 : 1	87,48 : 1
RASIO SOLVABILITAS	1134,68 : 1	657,08 : 1
RASIO UTANG		
Rasio utang Terhadap Ekuitas	0,09%	0,15%
Rasio Utang Terhadap Aset Modal	0,12%	0,20%
Rasio Utang Terhadap PAD	0,66%	1,28%

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Dari tabel dapat diketahui rasio keuangan dari pemerintah daerah kabupaten Sleman yaitu jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan 2013 rasio likuiditas dan solvabilitas selalu mengalami kenaikan, angka rasio lancar yang wajar adalah 2 : 1, sedangkan rasio lancar pada tahun 2014 mencapai 187,92 : 1 dan pada tahun 2013 mencapai 111,02 : 1 Rasio solvabilitas yang

dianggap aman minimal 1 : 1, sedangkan rasio solvabilitas tahun 2014 mencapai 1134,68 : 1 dan tahun 2013 mencapai 87,48 : 1. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah secara keuangan sangat likuid dan solvabel bahkan dapat dikatakan terlalu likuid (over-liquid).

Rasio utang semakin menurun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 itu menandakan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengembalikan utang dengan baik dan ada penurunan risiko bagi kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

3.3.1.2 Analisis Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran memuat realisasi penerimaan, pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode. Analisis realisasi anggaran Kabupaten Sleman sebagai berikut:

3.3.1.2.1 Efektivitas Pendapatan

Pemerintah menyusun peraturan pedoman penilaian tingkat efektivitas pendapatan melalui kepmendagri tahun 1996 berikut ini:

Tabel 4 Kriteria Efektivitas Pendapatan Tahun 2013-2014

KRITERIA EFEKTIVITAS	PRESENTASE EFEKTIVITAS
Sangat Efektif	>100%
Efektif	91%-100%
Cukup Efektif	81%-90%
Kurang Efektif	61%-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: *Kepmendagri Tahun 1996*

Analisisnya sebagai berikut:

Tabel 5 Analisis Efektivitas Pendapatan Tahun 2013-2014

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	%
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah	474.917.917.941,46	573.337.599.560,11	120,72	342.895.307.197,81	449.270.304.864,83	131,02
Pendapatan Transfer	1.494.346.282.376,24	1.499.148.394.633,56	100,32	1.425.543.181.151,30	1.442.483.146.251,00	101,19
Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	4.334.136.890,46	0	-	7.772.185.723,00	-
Jumlah Pendapatan	1.969.264.200.317,70	2.076.820.131.084,13	105,46	1.768.438.488.349,11	1.899.525.636.838,83	107,41
BELANJA						
Belanja Operasi	1.792.142.435.143,27	1.542.756.893.656,11	86,08	1.604.540.910.957,21	1.420.339.683.204,62	88,52
Belanja Modal	387.231.175.442,00	282.862.049.259,00	73,05	260.990.406.145,00	206.859.865.136,17	79,26
Belanja Tak Terduga	26.291.764.590,29	841.163.588,00	3,2	12.395.768.134,93	-	-
Transfer	82.980.481.285,00	70.017.270.985,25	84,38	68.453.277.826,99	66.328.748.665,00	96,9
Jumlah Belanja	2.288.645.856.460,56	1.896.477.377.488,36	82,86	1.946.380.363.064,13	1.693.528.297.005,79	87,01
surplus/(defisit)	-319.381.656.142,86	180.342.753.595,77	-56,47	-177.941.874.715,02	205.997.339.833,04	-115,77
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	431.359.469.619,86	431.359.469.619,86	100	289.079.874.715,02	289.079.874.715,22	100
Pengeluaran Pembiayaan	111.977.813.477,00	111.977.553.405,40	100	111.138.000.000,00	63.717.744.928,40	57,33
Pembiayaan netto	319.381.656.142,86	319.381.911.214,46	100	177.941.874.715,02	225.362.129.786,82	126,65
SILPA	-	499.724.664.810,23	0	-	431.359.469.619,86	-

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pendapatan Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Pendapatan meliputi pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan, daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), pendapatan transfer (transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat-lainnya, transfer pemerintah provinsi), lain-lain pendapatan daerah yang sah (pendapatan hibah).

Pendapatan sangat efektif karena persentasenya $>100\%$ yaitu sebesar 105,46%, tetapi persentasenya mengalami penurunan dari tahun 2013.

2) Belanja meliputi belanja operasional (belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya), belanja tidak terduga (pengembalian kelebihan penerimaan BPHTB dan untuk tanggap darurat penanggulangan bencana abu vulkanik gunung kelud), belanja transfer (bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa).

Belanja cukup efektif karena persentasenya antara 81%-90% yaitu sebesar 82,86% tetapi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang artinya mengalami penghematan/efektivitas belanja.

3) Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan (SILPA tahun anggaran sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal pemda, pembayaran pokok utang ke pemerintah pusat).

Pembiayaan efektif karena persentasenya antara 91%-100% yaitu sebesar 100%. Artinya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan seimbang.

Sedangkan efektifitas pendapatan Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan meliputi pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan, daerah yang dipisahkan, lain-

lain PAD yang sah), pendapatan transfer (transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat-lainnya, transfer pemerintah provinsi), lain-lain pendapatan daerah yang sah (pendapatan hibah).

Pendapatan sangat efektif karena persentasenya $>100\%$ yaitu sebesar 107,41%.

2. Belanja meliputi belanja operasional (belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya), belanja tidak terduga (pengembalian kelebihan penerimaan BPHTB dan untuk tanggap darurat penanggulangan bencana abu vulkanik gunung kelud), belanja transfer (bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa).

Belanja cukup efektif karena persentasinya antara 81%-90% yaitu 87,01%.

3. Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan (SILPA tahun anggaran sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal pemda, pembayaran pokok utang ke pemerintah pusat).

Pembiayaan sangat efektif karena $>100\%$ yaitu sebesar 125,65%.

3.3.1.2.2 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan tidak bersifat absolut melainkan bersifat relatif.

Analisisnya sebagai berikut:

Tabel 6 Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2013-2014

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	%
BELANJA						
BELANJA OPERASI	1.792.142.435.143,27	1.542.756.893.656,11	86,08	1.604.540.910.957,21	1.420.339.683.204,62	88,52
Belanja Pegawai/Personalia	1.288.392.920.497,27	1.110.060.035.820,14	86,16	1.161.524.368.836,40	1.034.255.811.435,98	89,04
Belanja Barang dan Jasa	402.709.029.480,00	351.490.651.032,79	87,28	250.125.006.794,81	227.028.261.886,61	90,77
Belanja Bunga	144.000.000,00	12.341.084,68	8,57	144.000.000,00	28.750.905,83	19,97
Belanja Subsidi	-	-	0,00	34.745.931.658,00	19.518.562.420,00	56,18
Belanja Hibah	59.195.408.166,00	40.979.605.718,50	69,23	129.419.872.168,00	117.707.233.556,20	90,95
Belanja Bantuan Sosial	41.701.077.000,00	40.214.260.000,00	96,43	28.581.731.500,00	21.801.063.000,00	76,28
BELANJA MODAL	387.231.175.442,00	282.862.049.259,00	73,05	260.990.406.145,00	206.859.865.136,17	79,26
Belanja Tanah	58.805.400.000,00	17.763.305.909,00	30,21	58.597.146.055,00	37.115.234.370,00	63,34
Belanja Peralatan dan Mesin	80.272.887.776,00	58.797.899.977,00	73,25	52.095.617.295,00	45.628.593.658,40	87,59
Belanja Gedung dan Bangunan	147.369.407.554,00	125.749.831.238,00	85,33	86.406.447.175,00	73.350.676.738,77	84,89
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.100.401.870,00	77.800.572.649,00	85,40	54.599.042.470,00	49.490.108.162,00	90,64
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.683.078.242,00	2.750.439.486,00	28,40	9.292.153.150,00	1.275.252.207,00	13,72
BELANJA TAK TERDUGA	26.291.764.590,29	841.163.588,00	3,20	12.395.768.134,93	-	0,00
Belanja Tak Terduga	26.291.764.590,29	841.163.588,00	3,20	12.395.768.134,93	-	0,00
TRANSFER	82.980.481.285,00	70.017.270.985,25	84,38	68.453.277.826,99	66.328.748.665,00	96,90
Transfer Bagi Hasil ke Desa	82.980.481.285,00	70.017.270.985,25	84,38	68.453.277.826,99	66.328.748.665,00	96,90
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	41.583.030.285,00	34.793.261.504,00	83,67	33.879.052.826,99	33.366.158.150,00	98,49
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	41.397.451.000,00	35.224.009.481,25	85,09	34.574.225.000,00	32.962.590.515,00	95,34
JUMLAH BELANJA	2.288.645.856.460,56	1.896.477.377.488,36	82,86	1.946.380.363.064,13	1.693.528.297.005,79	87,01
surplus/(defisit)	(319.381.656.142,86)	180.342.753.595,77	-56,47	(177.941.874.715,02)	205.997.339.833,04	-115,77

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2013 maupun 2014 efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten Sleman termasuk dalam kategori efisien, karena dalam rasio efisiensi belanja tidak ada standar baku tetapi jika nilainya kurang dari 100% maka dapat dikatakan efisien. Presentase untuk 2014 lebih rendah daripada 2013 ini berarti efisiensi belanja

tahun 2014 lebih baik dibandingkan 2013, tetapi untuk nominal jumlah belanja lebih sedikit di tahun 2013, ini menandakan adanya peningkatan dalam belanja pada tahun 2014. Presentasi yang mengalami kenaikan paling besar adalah belanja transfer yaitu sebesar 96,90%. Meliputi bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah daerah dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Terjadi kenaikan presentasi karena nominal untuk bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah daerah dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, kenaikan itu disebabkan karena adanya pilihan kepala desa, pemilihan kepala dukuh dan adanya bencana erupsi merapi.

3.3.1.2.3 Analisis Pendapatan dan Belanja

Analisis pendapatan digunakan untuk melihat kemandirian keuangan daerah, sedangkan analisis belanja digunakan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

1. Perbandingan Pendapatan

Analisis perbandingan pendapatan digunakan untuk mengetahui kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Analisisnya sebagai berikut:

Tabel 7 Rasio Perbandingan Pendapatan Tahun 2013-2014 (dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013	NAIK/TURUN	
			RUPIAH	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	573.337.599.560,11	449.270.304.864,83	124.067.294.695,28	27,62
pendapatan Pajak Daerah	326.033.995.236,66	274.628.955.500,77	51.405.039.735,89	18,72
Pendapatan Retribusi Daerah	42.032.198.781,03	48.001.679.730,61	-5.969.480.949,58	-12,44
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.654.901.728,19	15.551.529.372,17	8.103.372.356,02	52,11
Lain-Lain PAD yang Sah	181.016.503.814,23	111.088.140.261,28	69.928.363.552,95	62,95
PENDAPATAN TRANSFER	1.499.148.394.633,56	1.442.483.146.251,00	56.665.248.382,56	3,93
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.034.404.522.916,00	992.782.430.677,00	41.622.092.239,00	4,19
Dana Bagi Hasil Pajak	41.222.388.370,00	46.908.099.802,00	-5.685.711.432,00	-12,12
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	384.280.433,00	348.339.971,00	35.940.462,00	10,32
Dana Bagi Hasil Cukai	4.190.444.113,00	3.112.748.904,00	1.077.695.209,00	34,62
Dana Alokasi Umum	952.102.502.000,00	891.589.912.000,00	60.512.590.000,00	6,79
Dana Alokasi Khusus	36.504.908.000,00	50.823.330.000,00	-14.318.422.000,00	-28,17
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	274.661.712.000,00	286.912.555.070,00	-12.250.843.070,00	-4,27
Dana Tunjangan pendidikan	-	-	-	-
DPPIP	-	-	-	-
DPPIPD	-	-	-	-
Bosnas	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	248.783.205.000,00	254.817.230.070,00	-6.034.025.070,00	-2,37
Dana Insentif Khusus	25.878.507.000,00	32.095.325.000,00	-6.216.818.000,00	-19,37
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	190.082.159.717,56	162.788.160.504,00	27.293.999.213,56	16,77
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	165.068.472.717,56	134.451.960.504,00	30.616.512.213,56	22,77
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Penda Lainnya	25.013.687.000,00	28.336.200.000,00	-3.322.513.000,00	-11,73
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.334.136.890,46	7.772.185.723,00	-3.438.048.832,54	-44,24
Pendapatan Hibah	4.334.136.890,46	1.016.000.000,00	3.318.136.890,46	326,59
Pendapatan Dari Piutang PBB-P2 yang belum serahterima	-	6.756.185.723,00	-6.756.185.723,00	-100
Total Pendapatan daerah	2.076.820.131.084,13	1.899.525.636.838,83	177.294.494.245,30	9,33

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Dilihat dari perbandingan pendapatan tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif dan cenderung naik dari tahun 2013. Kenaikan tersebut sebesar Rp177.294.494.245,30 (9,33%), artinya walaupun peningkatannya kecil tetapi ada kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman dari tahun 2013 ke tahun 2014. Kenaikan yang paling besar terjadi pada

pendapatan hibah yaitu sebesar 326,59% hal ini disebabkan karena hibah dari pemerintah pusat, dana WISMP (program pengelolaan sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan), penyerapan sisa dana erupsi merapi, penyerapan sisa dana pemberdayaan masyarakat korban erupsi merapi. Pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan yang besar ini disebabkan karena adanya kenaikan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan salah satunya karena potensi wisata di Sleman.

2. Perbandingan Belanja

Analisis perbandingan belanja digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun.

Analisisnya sebagai berikut:

Tabel 8 Rasio Perbandingan Belanja Tahun 2013-2014

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013	NAIK/TURUN	
			RUPIAH	%
BELANJA	1.896.477.377.488,36	1.693.528.297.005,79	202.949.080.482,57	11,98
BELANJA OPERASI	1.542.756.893.656,11	1.420.339.683.204,62	122.417.210.451,49	8,62
Belanja Pegawai/Personalia	1.110.060.035.820,14	1.034.255.811.435,98	75.804.224.384,16	7,33
Belanja Barang dan Jasa	351.490.651.032,79	227.028.261.886,61	124.462.389.146,18	54,82
Belanja bunga	12.341.084,68	28.750.905,83	(16.409.821,15)	(57,08)
Belanja Subsidi	-	19.518.562.420,00	(19.518.562.420,00)	(100,00)
Belanja Hibah	40.979.605.718,50	117.707.233.556,20	(76.727.627.837,70)	(65,19)
Belanja Bantuan Sosial	40.214.260.000,00	21.801.063.000,00	18.413.197.000,00	84,46
BELANJA MODAL	282.862.049.259,00	206.859.865.136,17	76.002.184.122,83	36,74
Belanja Tanah	17.763.305.909,00	37.115.234.370,00	(19.351.928.461,00)	(52,14)
Belanja Peralatan dan Mesin	58.797.899.977,00	45.628.593.658,40	13.169.306.318,60	28,86
Belanja Gedung dan Bangunan	125.749.831.238,00	73.350.676.738,77	52.399.154.499,23	71,44
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	77.800.572.649,00	49.490.108.162,00	28.310.464.487,00	57,20
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.750.439.489,00	1.275.252.207,00	1.475.187.282,00	115,68
BELANJA TIDAK TERDUGA	841.163.588,00	-	841.163.588,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	841.163.588,00	-	841.163.588,00	100,00
TRANSFER	70.017.270.985,25	66.328.748.665,00	3.688.522.320,25	5,56
Transfer Bagi Hasil ke Desa	70.017.270.985,25	66.328.748.665,00	3.688.522.320,25	5,56
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa	34.793.261.504,00	33.366.158.150,00	1.427.103.354,00	4,28
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	35.224.009.481,25	32.962.590.515,00	2.261.418.966,25	6,86

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Dilihat dari tabel terjadi kenaikan belanja dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu sebesar Rp202.949.080.482,57 (11,98%). Belanja yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah belanja aset lainnya yang terdiri dari buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak dan tumbuhan.

3.3.1.3 Analisis Laporan Arus Kas

Laporan arus kas relatif sulit untuk dimanipulasi. Laporan arus kas mencerminkan kondisi obyektif kas, arus masuk dan keluar kas yang dapat diuji dengan melihat neraca dan laporan realisasi anggaran. Analisisnya sebagai berikut:

Tabel 9 Analisis Laporan Arus Kas Tahun 2013-2014

ARUS KAS BERSIH	2014	2013	NAIK/TURUN
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	462.513.992.854,77	412.016.004.969,21	12,26%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(282.171.239.259,00)	(206.018.665.136,17)	119,52%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(111.977.558.405,40)	(63.717.744.928,40)	75,74%
Kenaikan/Penurunan Kas	68.365.195.190,37	142.279.594.904,64	
Saldo Awal Kas	431.359.469.619,86	289.079.874.715,22	
Saldo Akhir Kas	499.724.664.810,23	431.359.469.619,86	

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Dengan melihat pertumbuhan arus kas selama 2 tahun terakhir dapat dilihat bahwa adanya kenaikan kinerja keuangan pada tahun 2014 dibandingkan 2013. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Kas Operasi berasal dari arus kas masuk dan arus kas keluar.

Arus kas masuk: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana bagi hasil cukai, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, dana insentif daerah, bantuan keuangan dari provinsi, pendapatan hibah, pendapatan dari piutang PBB-P2

yang belum diserahkan. Arus kas keluar: belanja pegawai, belanja barang dan jasa non investasi, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintah provinsi/kabupaten/desa, belanja tak terduga.

Arus kas operasi selama tahun 2013-2014 bersaldo positif, ini merupakan hal yang bagus yang menunjukkan tidak adanya kesulitan keuangan di pemerintah daerah kabupaten Sleman. pada tahun 2014 pertumbuhannya yaitu 12,26%. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan arus kas operasi sebesar RP50.497.987.885,56 dari tahun 2013.

2. Arus kas investasi berasal dari arus masuk kas dan arus keluar kas.

Arus masuk kas: penjualan atas gedung dan bangunan, penjualan aset tetap, penjualan aset tetap lainnya. Arus keluar kas: bangunan dalam pengerjaan, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya, mutasi investasi permanen, biaya dibayar dimuka.

Arus kas investasi selama tahun 2013-2014 bersaldo positif dan mempunyai angka yang lebih besar dibandingkan dengan arus kas operasi dan arus kas pembiayaan. Kenaikannya sebesar 119,52% dilihat dari keseimbangan arus kas yang lain pertumbuhan arus kas investasi Kabupaten Sleman yang besar berarti bagus. Hal itu menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman sedang meningkatkan investasi yang bertujuan untuk memperbaiki fasilitas untuk menunjang potensi Wisata yang menjadi andalan Kabupaten Sleman agar lebih banyak wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Sleman.

3. Arus kas pembiayaan berasal dari arus masuk kas dan arus keluar kas.

Arus masuk kas: penerimaan kembali pinjaman, kompensasi pajak penghasilan, penerimaan pajak bencana. Arus keluar kas: pembiayaan pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah daerah, pemberian pinjaman daerah, pembayaran hutang pajak bencana, restitusi pajak.

Arus kas pembiayaan bersaldo positif untuk tahun 2013-2014. Kenaikannya sebesar 75,74%, hal ini menunjukkan adanya kenaikan kinerja keuangan dari tahun 2013-2014 pada kabupaten Sleman.

4. Dilihat dari kenaikan/penurunan kas selama tahun 2013-2014 mengalami penurunan, tetapi kondisinya masih aman sehingga kegiatan operasi Kabupaten Sleman tetap berjalan dengan baik.

3.3.2 Penyebab terjadinya kenaikan kinerja keuangan Kabupaten Sleman pada 2014.

Terjadinya kenaikan pendapatan dari pendapatan hibah karena penyerapan dana bantuan erupsi merapi pada tahun 2013 dan pendapatan asli daerah karena hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yaitu dari potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Sleman.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dilihat dari analisis laporan keuangan yang telah dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2014 mengalami kenaikan dan lebih baik karena keuangan Kabupaten Sleman sangat likuid dan solvabel bahkan dapat dikatakan terlalu likuid (*over-liquid*), tetapi masih dalam keadaan aman. Rasio utang semakin menurun itu menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk melunasi utang sangat bagus dan juga ada penurunan risiko bagi kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah kabupaten Sleman. Dilihat dari analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sleman efektif. Analisis laporan arus kas pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan.

Penyebab kenaikan kinerja keuangan dapat dilihat dari naiknya pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan asli daerah yang mengakibatkan kas pada tahun 2014 meningkat dan menurunnya kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

4.2 Saran

Saran yang diberikan untuk pemerintah kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:

1. Proporsi aset. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya meningkatkan investasi jangka panjang, tetapi jangan sampai proporsi untuk aset lancar turun terus menerus agar kegiatan operasi Kabupaten Sleman tidak terganggu.
2. Efisiensi belanja sangat penting agar tidak terjadi pemborosan dalam belanja dan mengganggu keuangan pemerintah kabupaten Sleman, karena pertumbuhan belanja lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Sleman lebih baik melakukan *Review* terhadap belanja daerah yang kurang efisien dapat dikurangi dan mengalokasikan dana anggaran belanja tersebut untuk belanja daerah yang lebih penting untuk menekan pertumbuhan belanja yang terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Drs. Abdul, MBA.,Akt, 2002, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2006, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Panti, 2015, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Periode 2012-2013*, Sekolah Vokasi, universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Pemerintah Kabupaten Sleman, *geografi/letak dan luas wilayah*, Arsip Pemerintah Kabupaten Sleman, diakses 24 Maret 2016, <http://www.slemankab.go.id/geografi/letak-dan-luas-wilayah/>
- DPKAD Kabupaten Sleman 2014, *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman*, Pemerintah Kabupaten Sleman, diakses 24 Maret 2016, dpkad.slemankab.go.id/download/

LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Atas Laporan Keuangan Aset Lancar

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

5.2.1 Aset Lancar

Saldo aset lancar Pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2014	(dalam Rupiah) 31 Desember 2013
1.	Kas	500.218.955.134,23	432.588.133.628,86
2.	Piutang Pajak (Netto)	81.111.252.974,48	21.917.863.525,48
3.	Piutang Retribusi (Netto)	3.452.061.817,80	3.752.980.123,95
4.	Piutang Lainnya (Netto)	9.737.155.203,01	14.909.782.841,72
5.	Persediaan	50.619.578.124,27	127.298.518.403,77
	Jumlah	645.139.003.253,79	609.467.676.523,78

5.2.1.1 Kas

Jumlah Kas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp500.218.955.134,23 dan Rp432.588.133.628,86 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2014	(dalam Rupiah) 31 Desember 2013
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	24.963.507.314,86	16.179.635.983,89
2.	Kas Lancar lainnya di Bendahara Pengeluaran	363.471.811,00	1.214.403.071,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	130.818.513,00	14.260.938,00
4.	Kas di BLUD	46.207.006.782,17	29.555.745.669,53
5.	Giro	103.554.150.713,20	65.584.067.966,44
6.	Deposito	325.000.000.000,00	320.000.000.000,00
	Jumlah	500.218.955.134,23	432.588.133.628,86

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp24.963.507.314,86 merupakan uang daerah sisa belanja Tahun Anggaran 2014 yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2014. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan bagian dari SILPA TA 2014 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	(dalam Rupiah) Jumlah
1.	DPRD	105.000,00
2.	Sekretariat Daerah	481.823.194,00
3.	Sekretariat DPRD	27.952.107,00
4.	Dinas Kesehatan	121.992.502,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	223.739.970,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	182.676.258,00
7.	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral	150.000,00

Lampiran 2 Catatan Atas Laporan Keuangan Persediaan

Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang tak Tertagih
Jumlah 2			
3. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	16.190.500,00		2.608.250,00
> 1 tahun			
> 3 s.d. 5 tahun	9.460.000,00	100%	9.460.000,00
> 5 s.d. 10 tahun	11.890.000,00	75%	8.917.500,00
1 s.d. 2 tahun	17.465.000,00	50%	8.732.500,00
< 1 tahun	68.049.000,00	25%	17.012.250,00
Jumlah 3	4.167.500,00		0,00
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan	111.031.500,00	0%	44.122.250,00
> 5 tahun			
> 3 s.d. 5 tahun	177.255.000,00	100%	177.255.000,00
> 5 s.d. 10 tahun	14.430.000,00	75%	10.822.500,00
1 s.d. 2 tahun	1.050.000,00	50%	525.000,00
< 1 tahun	7.100.000,00	25%	1.775.000,00
Jumlah 4	52.940.000,00		0,00
Jumlah 1 s.d. 4	252.895.000,00		190.392.500,00
			348.633.250,00

4. Piutang Dana Perimbangan

Piutang Dana Perimbangan sebesar Rp2.416.773.051,00 merupakan kekurangan penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut.

- Alokasi kurang bayar dana bagi hasil PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) TA 2011 sesuai Permenkeu No.182/PMK.07/2013 sebesar Rp2.004.167.991,00.
- Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD sesuai Permenkeu No.61/PMK.07/2014 sebesar Rp412.605.060,00.

5.2.1.5 Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan sebesar Rp127.298.916.403,77 merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut.

				(dalam Rupiah)
No.	Dinas	Jenis Sediaan		Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	Sediaan bahan pakai habis	32.208.100,00	
		Sediaan barang cetakan	9.868.465,00	42.074.565,00
2.	Set DPRD	Sediaan ATK	7.522.225,00	
		Sediaan benda-benda pos	815.000,00	
		Sediaan plakat	18.750.000,00	
		Sediaan barang cetakan	7.478.410,00	34.365.635,00
3.	DPKAD	Sediaan ATK	111.013.450,00	
		Sediaan benda-benda pos	10.950.000,00	
		Sediaan barang cetakan	99.135.750,00	
		Sediaan BBM	7.300.000,00	
		Sediaan alat listrik	4.522.500,00	
		Sediaan pupuk	7.456.000,00	240.377.700,00
		Sediaan ATK	8.697.500,00	8.697.500,00
4.	Bappeda	Sediaan ATK	3.300.200,00	3.300.200,00
5.	Inspektorat Kab	Sediaan bahan pakai habis	32.412.200,00	32.412.200,00
6.	BKD	Sediaan bahan pakai habis	76.058.250,00	
7.	Dishubkominfo	Sediaan bahan pakai habis	161.962.422,00	
		Sediaan barang cetakan	38.250.000,00	
		Sediaan BBM	2.461.102.000,00	2.737.372.672,00
		Sediaan bahan material	1.689.800,00	1.689.800,00
8.	Kec. Sleman	Sediaan ATK	823.650,00	823.650,00
9.	Kec. Mlati	Sediaan bahan pakai habis	502.350,00	502.350,00
10.	Kec. Cangkringan	Sediaan ATK	4.544.900,00	4.544.900,00
11.	Kec. Ngaglik	Sediaan ATK	7.920.100,00	7.920.100,00
12.	Kec. Berbah	Sediaan bahan pakai habis	544.500,00	544.500,00
13.	Kec. Gamping	Sediaan bahan pakai habis	1.905.200,00	1.905.200,00
14.	Kec. Turi	Sediaan ATK	3.849.750,00	3.849.750,00
15.	Kec. Minggir	Sediaan bahan pakai habis	1.080.000,00	1.080.000,00
16.	Kec. Depok	Sediaan bahan pakai habis	5.674.190,00	5.674.190,00
17.	Kec. Tempel	Sediaan ATK	3.908.700,00	3.908.700,00
18.	Kec. Ngemplak	Sediaan bahan pakai habis	636.300,00	636.300,00
19.	Kec. Godean	Sediaan bahan pakai habis	976.000,00	976.000,00
20.	Kec. Prambanan	Sediaan ATK	413.750,00	413.750,00
21.	Kec. Moyudan	Sediaan bahan pakai habis	2.253.500,00	2.253.500,00
22.	Kec. Seyegan	Sediaan bahan pakai habis	431.000,00	431.000,00
23.	Kec. Kalasan	Sediaan ATK	3.914.600,00	3.914.600,00
24.	Kec. Pakem	Sediaan bahan pakai habis	74.404.750,00	
25.	Dispersanhut	Sediaan hewan ternak/ikan		

No.	Dinas	Jenis Sediaan	Jumlah
26	Disnakersos	Sediaan pupuk/obat	25.570.060,00
		Sediaan alat RT	12.135.450,00
		Sediaan alat listrik	12.919.000,00
		Sediaan bahan pakai habis	39.431.125,00
		Sediaan karcis dan cetakan	11.473.854,25
		Sediaan ATK	2.754.750,00
		Sediaan barang cetakan	2.075.000,00
		Sediaan alat kebersihan	1.100.300,00
		Sediaan alat listrik	1.343.000,00
		Sediaan benda-benda pos	1.857.000,00
27	Kantor Pelayanan Perijinan	Sediaan ATK	819.500,00
		Sediaan barang cetakan	5.400.000,00
		Sediaan benda pos	1.325.000,00
28	Dinas Kesehatan	Sediaan ATK	81.867.086,00
		Sediaan barang cetakan	174.802.135,00
		Sediaan obat	5.651.974.422,00
		Sediaan alat kebersihan	20.318.301,00
		Sediaan alat listrik	6.805.150,00
		Sediaan BBM	1.185.000,00
		Sediaan ATK	55.075.764,00
		Sediaan benda-benda pos	1.332.000,00
		Sediaan barang cetakan	54.516.508,00
		Sediaan obat	3.197.085.346,00
29	RSUD Sleman	Sediaan bahan makan pasien	689.775,00
		Sediaan bahan laborat	51.594.674,00
		Sediaan bahan radiologi	8.467.929,00
		Sediaan alat kebersihan	18.068.980,00
		Sediaan alat listrik dan elektronik	23.192.000,00
		Sediaan BBM	68.920.000,00
		Sediaan ATK	2.213.074.873,00
		Sediaan alat listrik dan elektronik	256.737.000,00
		Sediaan obat	34.997.383,00
		Sediaan benda pos	18.606.475,00
30	Dinas Pendidikan	Sediaan bahan praktik	52.651.850,00
		Sediaan bahan material	101.147.272,00
		Sediaan bahan percontohan	217.428.734,00
		Sediaan bahan pemeliharaan	374.500,00
		Sediaan tumbuhan	60.000,00
		Sediaan alat kebersihan	232.644.843,00
		Sediaan ATK	77.457.005,00
		Sediaan fas pelayanan sampah/kebersihan	344.671.998,00
		Sediaan bibit tanaman	32.985.600,00
		Sediaan aspal	6.970.399.429,68
31	DPUP	Sediaan batu/bahan material	480.324.254,33
		Sediaan BBM	663.473.230,00
		Sediaan suku cadang kendaraan bermotor	1.157.846.400,00
		Sediaan cetak	2.642.395,00
		Sediaan alat listrik	2.514.259,00
		Sediaan pupuk/obat/alat pertanian	5.946.325,00
		Sediaan barang yg akan diserahkan kepada masyarakat	89.185.592.189,89
		Sediaan ATK	630.055,00
		Sediaan barang yg akan diserahkan kepada masyarakat	110.840.000,00
		Sediaan bahan pakai habis	1.503.417.802,00
32	KLH	Sediaan barang cetakan	6.020.600.966,00
		Sediaan bahan pakai habis	1.406.200,00
33	Catatan Sipil	Sediaan bahan pakai habis	8.756.600,00
		Sediaan ATK	11.142.100,00
34	Dinas Budpar	Sediaan alat kebersihan	19.798.850,00
		Sediaan alat listrik	5.925.850,00
35	DPPD	Sediaan karcis	188.565.634,62
		Sediaan karcis	285.765.040,00
36	Dinas Pasar	Sediaan sarana penataan	25.748.800,00
		Sediaan ban	68.124.338,00
37	RSUD Prambanan	Sediaan bahan pakai habis	57.774.865,00
		Sediaan cetak dan jilid	16.708.925,00
		Sediaan alat kebersihan	1.805.958.687,00
		Sediaan obat	67.303.167,00
		Sediaan bahan laborat	22.688.639,00

Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang tak Tertagih
Jumlah 2			
3. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	16.190.000,00		2.608.250,00
> 3 s.d. 5 tahun	9.460.000,00	100%	9.460.000,00
> 3 s.d. 3 tahun	11.850.000,00	75%	8.887.500,00
> 3 s.d. 2 tahun	17.465.000,00	50%	8.732.500,00
< 1 tahun	63.049.000,00	25%	15.762.250,00
Jumlah 3	4.167.500,00	0%	0,00
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan	111.031.500,00		44.122.250,00
> 3 s.d. 5 tahun	177.255.000,00	100%	177.255.000,00
> 3 s.d. 3 tahun	14.430.000,00	75%	10.822.500,00
> 3 s.d. 2 tahun	1.080.000,00	50%	540.000,00
< 1 tahun	7.100.000,00	25%	1.775.000,00
Jumlah 4	52.940.000,00	0%	0,00
Jumlah 1 s.d 4	252.895.000,00		190.382.500,00

4. Piutang Dana Perimbangan

Piutang Dana Perimbangan sebesar Rp2.416.773.051,00 merupakan kekurangan penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut.

- Alokasi kurang bayar dana bagi hasil PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) TA 2011 sesuai Permenkeu N0.182/PMK.07/2013 sebesar Rp2.004.167.991,00.
- Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD sesuai Permenkeu No.61/PMK.07/2014 sebesar Rp412.605.060,00.

5.2.1.5 Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan sebesar Rp127.298.916.403,77 merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut.

				(dalam Rupiah)
No.	Dinas	Jenis Sediaan	Jumlah	
1.	Sekretariat Daerah	Sediaan bahan pakai habis	32.208.100,00	
		Sediaan barang cetakan	9.868.465,00	42.074.565,00
2.	Set DPRD	Sediaan ATK	7.522.225,00	
		Sediaan benda-benda pos	615.000,00	
		Sediaan plakat	18.760.000,00	
		Sediaan barang cetakan	7.478.410,00	34.365.635,00
3.	DPKAD	Sediaan ATK	111.013.450,00	
		Sediaan benda-benda pos	10.950.000,00	
		Sediaan barang cetakan	99.135.750,00	
		Sediaan BBM	7.300.000,00	
		Sediaan alat listrik	4.522.500,00	
		Sediaan pupuk	7.456.000,00	240.377.700,00
4.	Bappeda	Sediaan ATK	8.697.500,00	8.697.500,00
5.	Inspektorat Kab	Sediaan bahan pakai habis	3.300.200,00	3.300.200,00
6.	BKD	Sediaan bahan pakai habis	32.412.200,00	32.412.200,00
7.	Dishubkominfo	Sediaan barang cetakan	76.058.250,00	
		Sediaan barang cetakan	161.962.422,00	
		Sediaan BBM	38.250.000,00	
		Sediaan bahan material	2.461.102.000,00	2.737.372.672,00
8.	Kec. Sleman	Sediaan ATK	1.689.800,00	1.689.800,00
9.	Kec. Mlati	Sediaan bahan pakai habis	823.650,00	823.650,00
10.	Kec. Cangkringan	Sediaan ATK	502.350,00	502.350,00
11.	Kec. Ngaglik	Sediaan ATK	4.544.900,00	4.544.900,00
12.	Kec. Berbah	Sediaan bahan pakai habis	7.920.100,00	7.920.100,00
13.	Kec. Gamping	Sediaan bahan pakai habis	544.500,00	544.500,00
14.	Kec. Turi	Sediaan ATK	1.905.200,00	1.905.200,00
15.	Kec. Minggir	Sediaan bahan pakai habis	3.849.750,00	3.849.750,00
16.	Kec. Depok	Sediaan bahan pakai habis	1.080.000,00	1.080.000,00
17.	Kec. Tempel	Sediaan ATK	5.674.190,00	5.674.190,00
18.	Kec. Ngemplak	Sediaan bahan pakai habis	3.908.700,00	3.908.700,00
19.	Kec. Godean	Sediaan bahan pakai habis	636.300,00	636.300,00
20.	Kec. Prambanan	Sediaan ATK	976.000,00	976.000,00
21.	Kec. Moyudan	Sediaan bahan pakai habis	413.750,00	413.750,00
22.	Kec. Seyegan	Sediaan bahan pakai habis	2.253.500,00	2.253.500,00
23.	Kec. Kalasan	Sediaan ATK	431.000,00	431.000,00
24.	Kec. Pakem	Sediaan bahan pakai habis	3.914.600,00	3.914.600,00
25.	Disperanthut	Sediaan hewan ternak/ikan	74.404.750,00	

No.	Dinas	Jenis Sediaan	Jumlah
		Sediaan bahan radiologi	41.231.400,00
38.	Disperindagkop	Sediaan bahan aikes	2.500.000,00
		Sediaan bahan pakai habis	1.284.750,00
39.	Sekretariat Korpri	Sediaan barang cetakan	6.211.000,00
40.	KP3M	Sediaan bahan pakai habis	2.772.100,00
		Sediaan ATK	315.400,00
		Sediaan buku profil PMA-PMDN	10.800.000,00
		Sediaan booklet dan handbag	2.746.800,00
		Sediaan leaflet	1.247.400,00
41.	Dinas SDAEM	Sediaan CD promosi investasi	1.209.600,00
		Sediaan bahan pakai habis	14.853.100,00
		Sediaan barang yg akan diserahkan kepada masyarakat (instalasi)	1.183.516.550,00
42.	Salpol PP	Sediaan bahan habis pakai	7.711.700,00
43.	Badan KB, PM & PP	Sediaan bahan habis pakai	176.343.748,00
44.	Kant Perustakaan	Sediaan bahan habis pakai	401.550,00
45.	Kantor Kesbang	Sediaan ATK	793.750,00
46.	BPBD	Sediaan bahan habis pakai	546.900,00
47.	Dipenda	Sediaan bahan habis pakai	95.666.450,00
		Sediaan barang cetakan	300.227.245,00
48.	Kantor Arsip	Sediaan barang cetakan	11.432.465,00
49.	Pernkab	Sediaan bahan habis pakai	416.099.340,00
	Jumlah		127.298.916.403,77

5.2.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sleman per Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdiri dari :

31

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Investasi Non Permanen	49.927.472.883,00	50.856.069.417,00
2.	Investasi Permanen	182.416.544.743,29	117.351.601.825,85
	Jumlah	232.344.017.626,29	168.207.671.242,85

5.2.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk penguatan modal yang diberikan sebagai pinjaman bergulir dan non bergulir kepada masyarakat per 31 Desember 2013. Jumlah saldo Penguatan Modal kepada masyarakat tersebut terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Saldo Giro	13.779.514.064,00	14.007.133.265,00
2.	Piutang pada Masyarakat (APBD)	36.686.361.431,00	35.438.730.526,00
	Penyisihan piutang tak tertagih	(4.859.449.495,00)	(3.930.126.261,00)
3.	Piutang Khusus	4.160.406.650,00	5.185.416.654,00
4.	Piutang pada masyarakat (APBN)	153.324.600,00	156.724.900,00
	Penyisihan piutang tak tertagih	(153.324.600,00)	(156.724.900,00)
5.	Rekening SKPD	160.640.233,00	154.915.233,00
	Jumlah	49.927.472.883,00	50.856.069.417,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2013 merupakan saldo giro penguatan modal dan saldo piutang dana bergulir serta rekening giro penguatan modal SKPD. Mutasi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2012	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2013
1.	Giro Penguatan Modal	14.007.133.265,00	22.527.680.799,00	22.755.300.000,00	13.779.514.064,00
2.	Piutang PM pada Masyarakat (APBD)	35.438.730.526,00	22.756.300.000,00	21.508.669.095,00	36.686.361.431,00
3.	Piutang PM pada Masyarakat (APBN)	156.724.900,00	1.442.500,00	4.842.800,00	153.324.600,00
4.	Piutang PM Khusus koperasi	5.185.416.654,00	0,00	1.025.010.004,00	4.160.406.650,00
5.	Rekening SKPD	154.915.233,00	6.725.000,00	1.000.000,00	160.640.233,00
	Jumlah	54.942.920.578,00	45.292.148.299,00	45.294.821.899,00	54.940.246.978,00

Atas investasi non permanen diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Suku bunga atau kontribusi yang dikenakan terhadap penerima dana penguatan modal adalah sebesar 6% per tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal.

Lampiran 3 Catatan Atas Laporan Keuangan Transfer 2013

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Rincian realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebesar Rp34.793.261.504,00 adalah sebagai berikut

No.	Uraian	(dalam Rupiah) Jumlah
1.	Bagi hasil kepada Pemerintah Desa (ADD)	
2.	Bagi hasil pajak daerah	15.145.428.100,00
3.	Bagian retribusi daerah	17.217.000.000,00
4.	Retribusi kawasan wisata Kaliurang	1.920.126.644,00
	Jumlah	34.793.261.504,00

Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp35.224.009.481,25 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	(dalam Rupiah) Jumlah
1.	Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten	
	-Sharing TPA Piyungan	1.137.657.000,00
2.	Bantuan keuangan kepada pemerintah desa	
	-TPAPD	18.823.150.000,00
	-Tambahan desa minus	621.000.000,00
	-Tunjangan BPD	4.920.450.000,00
	-Ops dukuh	1.454.400.000,00
	-Bantuan pilduk	216.796.000,00
	-Tunjangan RT/RW	4.171.200.000,00
	-Bantuan pilkades	518.275.000,00
	-Bantuan tanah pelungguhan terkena erupsi Merapi	234.000.000,00
	-Bantuan TPKK Desa	258.000.000,00
	-Bantuan TPKK Dusun	1.454.400.000,00
	-Distribusi raskin	550.800.000,00
3.	Bantuan Keuangan Kepada PARPOL	863.881.481,25
	Jumlah	35.224.009.481,25

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	(dalam Rupiah) Lebih/Kurang
1.	Penerimaan Pembiayaan	431.359.469.619,86	431.359.469.619,86	0,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	111.977.813.477,00	111.977.558.405,40	(255.071,60)
	Netto	319.381.656.142,86	319.381.911.214,46	255.071,60

